



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

B2

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 28 April 2017 No. 34

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)**

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Ir.SLAMET SUSENO PRIYANTO
2. Jabatan : DIREKTUR - PENGELOLAAN PRASANA
3. NHK : 101534
4. Alamat Kantor : Jl. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 1, BANDUNG
5. Tanggal Pelaporan : 22 Oktober 2012, 31 Desember 2015

Status Laporan

	22 Oktober 2012	31 Desember 2015
--	-----------------	------------------

II. DATA HARTA

**A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH DAN BANGUNAN)**

	Rp. 117.745.000	Rp. 362.689.000
1. Tanah & Bangunan seluas 247 m2 & 100 m2, di Kota SEMARANG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2002 sampai dengan 2009	Rp. 117.745.000	Rp. 117.745.000
2. Tanah seluas 1.008 m2, di Kota SEMARANG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2014 (Penambahan Data Baru)	-----	Rp. 244.944.000

B. HARTA BERGERAK

**a. ALAT TRANSPORTASI
DAN MESIN LAINNYA**

	Rp. 371.500.000	Rp. 662.400.000
--	-----------------	-----------------

	22 Oktober 2012	31 Desember 2015
C. SURAT BERHARGA	Rp. 0	Rp. 0
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA	Rp. 121.874.137	Rp. 321.874.137
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Penambahan Data Harta Kekayaan)	Rp. 121.874.137	Rp. 321.874.137
E. PIUTANG	Rp. 0	Rp. 0
TOTAL HARTA (II)	Rp. 768.119.137	Rp. 1.503.963.137

III. HUTANG	-----	Rp. 595.348.911
1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN UANG (Penambahan Hutang baru)	-----	Rp. 595.348.911
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)	Rp. 768.119.137	Rp. 908.614.226

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

